

PAKDE  
KARWO

PINTU  
GERBANG  
MEA  
2015  
HARUS DIBUKA







"Saya harus memberikan motivasi sekaligus memfasilitasi dengan memompa spirit warga bahwa MEA bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi dengan langkah-langkah dan upaya yang tertata agar kita terus *survive*, bahkan menjadi *Regional Champion*."

Saya menyambut baik terbitnya buku ini yang digagas oleh para kolega dengan melibatkan akademisi, profesional, budayawan-sastrawan, dan aktivis dari berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai gagasan akademik dan pemikiran kreatif-solitif yang terhimpun dalam buku ini laksana landasan pijak dan cahaya pemandu bagi siapa saja yang peduli dengan kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia."

—Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo), Gubernur Jawa Timur.

**P**akde Karwo berupaya memberikan apa yang diamanatkan secara demokratis oleh rakyat dalam koridor MEA, pintu gerbang itu harus dibuka. Semangat membuka pintu gerbang MEA ini mengingatkan kita pada ungkapan puitis sastrawan Freiligrath yang acap kali dirujuk oleh Bung Karno dalam berpidato: "*Man totet de Geist nicht*" yang arti bebasnya: "Semangat tidak bisa dibunuh." Maka, bersemangatlah menghadapi masa depan terutama dalam gerbang persaingan MEA 2015 dengan penuh kemampuan bersaing, bekerja sama, bahu-membahu, tolong-menolong, dan bergotong royong bagi kegemilangan Indonesia. Dengan kebersamaan, kerukunan, dan bergotong royong kita dapat menjadi penentu perubahan komunitas ekonomi ASEAN.

Puluhan penulis telah memberikan kontribusinya dalam buku *Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka* ini dengan segala pemikiran, gagasan, dan solusi yang disodorkan.

#### TIM PENULIS

- |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dr. H. Soekarwo</b><br>Gubernur Jawa Timur                                                                                                                  | <b>Viddy Ad Daery</b><br>Budayawan, Penyair, Novelis, dan Pembuat Film                                                         |
| <b>Prof. Tri Widodo, Ph.D.</b><br>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta                                                                                          | <b>K.H. D. Zawawi Imron</b><br>Sastrawan Madura                                                                                |
| <b>Dr. Andarwati, S.E., M.E.</b><br>Universitas Brawijaya, Malang                                                                                              | <b>Prof. Dr. H. Prasetyo Rijadi</b><br>Universitas Bhayangkara, Surabaya                                                       |
| <b>Dr. Mahmud Syaltout, DEA</b><br>Universitas DEA Indonesia, Jakarta                                                                                          | <b>Dr. H. Suparto Wijoyo</b><br>Dosen Universitas Airlangga, Surabaya                                                          |
| <b>Dr. John Suprihanto, MIM</b><br>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta                                                                                         | <b>Prof. Dr. Sudharto P. Hadi</b><br>Universitas Diponegoro, Semarang                                                          |
| <b>Agusta Ika Prihanti Nugraheni, S.E., MBA</b><br>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta                                                                         | <b>Dr. Eko Sugiharto</b><br>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta                                                                |
| <b>Prof. Dr. Djoko Mursinto</b><br>Universitas Airlangga, Surabaya                                                                                             | <b>Prof. M. Suparmoko, M.A., Ph.D.</b><br>Universitas Budi Luhur, Jakarta                                                      |
| <b>Prof. Mas'ud Said, Ph.D.</b><br>Universitas Muhammadiyah, Malang                                                                                            | <b>Dr. Ir. Basuki Wasis</b><br>Fakultas Kehutanan IPB                                                                          |
| <b>Prof. Mohammad Nuh, Ph.D.</b><br>Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya                                                                                   | <b>Prof. Dr. Rudi Wibowo, MS.</b><br>Universitas Negeri Jember                                                                 |
| <b>Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela</b><br>Universitas Negeri Surabaya                                                                                             | <b>Dr. Luh Putu Suciati, MS.</b><br>Universitas Negeri Jember                                                                  |
| <b>Dr. Ir. Eddy Soejono</b><br>Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya                                                                                        | <b>Dr. Ir. Zainal Abidin</b><br>UPN, Surabaya                                                                                  |
| <b>Dr. Ir. Amien Widodo</b><br>Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya                                                                                        | <b>Dhiana Puspitawati, Ph.D.</b><br>Universitas Brawijaya, Malang                                                              |
| <b>Dr. Indra Perwira</b><br>Universitas Padjadjaran, Bandung                                                                                                   | <b>Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf</b><br>Universitas Parahyangan, Bandung                                                         |
| <b>Dr. Ibrahim, LL.M.</b><br>Komisi Yudisial Republik Indonesia                                                                                                | <b>Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng</b><br>Guru Besar Ilmu Hukum dan Sekretaris Dewan Guru Besar<br>Universitas Hasanuddin, Makassar |
| <b>dr. Ario Djatmiko, Sp.B.K. (Onk)</b><br>Ahli Bedah, Universitas Airlangga & Ketua Bidang Penataan<br>Praktik Global; Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia | <b>Nilam Andalia Kurniasari, LL.M.</b><br>Universitas Airlangga, Surabaya                                                      |



**KENCANA**  
PRENADAMEDIA GROUP  
E-mail: pmg@prenadamedia.com  
http: www.prenadamedia.com

ISBN 978-602-1186-50-3



9 786021 1186503

12

# **PAKDE KARWO PINTU GERBANG MEA 2015 HARUS DIBUKA**

Editor:

**Dr. H. Suparto Wijoyo  
Prof. Dr. H. Prasetijo Rijadi**



**PAKDE KARWO: PINTU GERBANG MEA 2015 HARUS DIBUKA**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2015

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-1186-50-3 338.959 826

19 x 26 cm

xxxiv, 600 hlm

Cetakan ke-1, Februari 2015

**Kencana. 2015.0533**

**Editor**

Dr. H. Suparto Wijoyo

Prof. Dr. H. Prasetyo Rijadi

**Desain Sampul**

tambra23@yahoo.com

**Penata Letak**

Tim Produksi

**Percetakan**

PT Kharisma Putra Utama

**Divisi Penerbitan**

KENCANA

**Penerbit**

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp. (021) 478-64657 Faks. (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



## Jawa Timur untuk Pendidikan Daerah Tertinggal

Oleh: Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela

Universitas Negeri Surabaya

---

### A. SEBUAH PERKENALAN

Siang itu, saya sedang berada di ruang kerja, di Kantor Program Pengembangan Profesi Guru (PPPG) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), saat ponsel saya berdering. Sebuah suara yang cukup saya kenal menyapa dari seberang. Saya langsung teringat pada laki-laki jangkung pemilik suara yang ramah itu. Saya mengenalnya lewat sahabat saya, Ibu Sirikit Syah. Waktu itu, kami, PPPG Unesa, membutuhkan satu narasumber untuk materi keterampilan berkomunikasi dan sosiokultural. Kami biasanya menggandeng Mas Rukin Firda, wartawan senior *Jawa Pos*, yang sahabat saya dan Bu Sirikit juga, dan telah banyak mendampingi kami melakukan pengiriman, penjemputan, dan pendampingan para peserta Program Jawa Timur Mengajar (JM) dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (SM-3T). Namun karena pada awal Agustus 2014 yang lalu Mas Rukin berpulang akibat kecelakaan lalu lintas di Kawasan Bungurasih, saya mencoba meminta bantuan Bu Sirikit untuk menggantikannya. Pengalaman dan wawasan Bu Sirikit sebagai mantan jurnalis, penulis, pelatih menulis, dosen, telah membawanya blusukan ke berbagai wilayah Tanah Air dan memberinya banyak kesempatan untuk berkunjung ke berbagai negara, ditambah dengan latar belakang pendidikannya yaitu komunikasi, maka tepat sudah. Tetapi, meskipun Bu Sirikit sangat berminat dan ingin memenuhi permohonan kami, ternyata beliau sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan.

Maka, akhirnya jadilah kami diperkenalkan dengan sosok itu, Dr. Suparto Wijoyo. Bu Sirikit memastikan, beliau adalah orang yang sangat cocok untuk topik itu. Pak Parto orang yang sangat berpengalaman, kaya wawasan, atraktif, *humble*, pergaulannya luas dengan segala kalangan, dan senang berjejaring.

Akhirnya kami mengundang Pak Parto untuk menjadi salah satu instruktur di kegiatan kami. Dan benar. Seperti itulah adanya. Semuanya cocok dengan yang dideskripsikan Bu Sirikit.

Dan baru saja, orang itu menelepon. Meminta saya bergabung dengan para guru besar dan doktor dari perguruan tinggi lain serta para tokoh masyarakat dan budayawan, untuk membuat tulisan dalam buku *Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*,



tentu saja dari perspektif kesiapan Jawa Timur. Pada dasarnya, buku ini akan menjadi semacam antologi di mana salah satu penulisnya adalah Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, yang lebih dikenal dengan nama Pakde Karwo itu.

Seketika saya heran, mengapa Pak Parto meminta saya untuk bergabung menulis dalam buku itu. Keheranan saya sangat beralasan. Saya tidak terlalu dekat dengan Pakde Karwo secara personal. Saya mengenalnya sebagai pejabat, sebagai gubernur. Saya tahu bahwa beliau berkumis tebal dan kumis ini menambah kewibawaannya. Saya sekadar hafal wajahnya, bukan hanya karena beliau sering muncul di berbagai media, namun juga karena saya beberapa kali berkesempatan bersemuka dengan beliau. Seingat saya, saya pernah '*nggowes*' bersama Pakde Karwo di Tuban saat reuni akbar SMA 2, almamater saya. Waktu itu saya berada dalam rombongan para petinggi panitia reuni dan berada dekat dengan Pakde Karwo dan rombongannya. Saya juga pernah cukup dekat—dalam arti jarak—dengan beliau saat Unesa mengadakan jalan sehat dalam rangka *dies natalis*. Saya, yang pasti, sangat mengenal wajah dan penampilan beliau, meski beliau—saya yakin—tidak mengenal saya sama sekali.

Alasan keheranan saya yang lain adalah, saya—maaf kalau harus saya katakan—tidak ada aktivitas dengan dunia politik. Sekadar tahu informasi, cukuplah bagi saya. Sesekali berdebat dengan kawan dan nyambung, itu sudah cukup. Saya selalu mengambil posisi menghindar bersentuhan dengan apa pun yang berbau politik, kecuali saat pemilu, saya tetap berusaha untuk menjadi warga negara yang baik dengan ikut *voting*. Meski beberapa kali ada saja orang yang mencoba menyeret saya dalam pusaran politik, saya tak bergeming. Saya tidak muak dengan politik, tetapi saya merasa biarlah orang lain yang menggelutinya dan biarkan saya menggeluti urusan lain yang juga penting. Sesuai porsi masing-masing.

Setidaknya dua alasan itulah yang menyebabkan keheranan saya ketika Pak Parto mengajak saya untuk menulis tentang kinerja Pakde Karwo. Dan seperti memahami pertanyaan saya, Pak Parto menjelaskan kenapa beliau mengajak saya bergabung. Pak Parto bilang, beliau sangat terkesan dengan buku saya *Berbagi di Ujung Negeri*. Buku ini saya hadiahkan pada beliau sebagai salah satu tanda terima kasih kami saat Prakondisi SM-3T yang lalu, karena beliau telah membantu kegiatan kami. Sebuah buku yang mengisahkan perjalanan saya mengunjungi berbagai pelosok Tanah Air dalam rangka melakukan pendampingan Program SM-3T. Di buku ini, saya mengabarkan tentang betapa memprihatinkannya kondisi pendidikan di daerah Sumba Timur, Talaud, Aceh Singkil, Maluku Barat Daya, dan Mamberamo Raya. Betapa rendah etos kerja guru dan kepala sekolah, betapa minim daya dukung sekolah, orangtua dan masyarakat, dan betapa mereka sangat membutuhkan sentuhan pemerintah dan pihak-pihak yang mau peduli. Kondisi infrastruktur yang sangat mengenaskan, jalan yang tidak layak dan berbahaya, rumah-rumah dan sekolah yang berlantai tanah, air dan bahan makanan yang susah didapat, anak-anak ingusan yang lapar dan kurang gizi, akses layanan kesehatan yang nyaris mustahil, listrik dan sinyal yang tak jelas keberadaannya, dan kondisi lain yang sungguh membuat hati ini menangis dan bertanya-tanya: inikah Indonesiaku?



## B. PENGHARGAAN UNTUK PENDIDIKAN INKLUSI

Pada lanjutan ceritanya, saya pun menerima tawaran Pak Parto dengan suka cita. Kenapa tidak? Menulis adalah hal yang menyenangkan bagi saya. Menulis sesuatu yang baru adalah tantangan. Apa lagi tentang seseorang yang menjadi *public figure* karena jabatan dan sepak terjangnya. Seseorang yang menjadi orang nomor wahid di Jawa Timur ini. Sebuah provinsi yang menjadi barometer nasional tentang kinerja pembangunan di segala bidang.

Untungnya, Pak Parto mengirimkan beberapa bahan bagi kami para penulis, untuk membantu proses penulisan. Benar, bahan-bahan ini sangat membantu, terutama bagi saya pribadi, yang suka 'sok sibuk' melakukan ini itu, dan akhirnya kurang *update* informasi seputar dunia perpolitikan dan pemerintahan.

Salah satu bahan itu, adalah daftar riwayat penghargaan Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo. Sejak memulai jabatannya pada 2009, sampai tulisan ini dibuat, Pakde Karwo sudah mengantongi 67 penghargaan (saat buku ini terbit menjadi 70 penghargaan). Cukup fantastis, bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang menerima 91 penghargaan selama lima tahun masa jabatannya. Juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, yang menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai gubernur peraih penghargaan terbanyak dalam tiga tahun kepemimpinannya (93 penghargaan). Tetapi angka 67 (kini 70, editor) bagi Pakde Karwo yang terus bergerak. Setidaknya, angka ini mengingatkan tahun kelahiran saya. Dan, kalau dirata-rata, maka Pakde Karwo menerima 13-14 penghargaan per tahun.

Penghargaan yang diterima Pakde Karwo beragam bidangnya. Namun yang ingin saya hitung adalah berapa banyak penghargaan yang diterimanya dalam bidang pendidikan. Lumayan, 6 penghargaan. Dari 6 penghargaan itu, mari kita cermati: 1 penghargaan amal bhakti dari Kementerian Agama, 1 anugerah pendidikan inklusi dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), 1 penghargaan percepatan penyaluran BOS dari Wakil Presiden RI, 1 penghargaan sebagai *best alumni* dari Universitas Surabaya, 1 anugerah aksara utama untuk percepatan pemberantasan buta huruf dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dan 1 penghargaan untuk juara umum festival dan lomba seni siswa nasional.

Dari 6 penghargaan dalam bidang pendidikan itu, bagi saya pribadi, yang paling mengesankan adalah *penghargaan untuk pendidikan inklusi*. Saya bangga pada Pakde Karwo. Penghargaan yang diterimanya terkait dengan pendidikan inklusi menjadi bukti betapa sosok ramah itu memiliki kepedulian pada penegakan hak asasi manusia. Beliau sangat memahami bahwa sistem pelayanan pendidikan nasional sudah seharusnya menghargai semua anak. Pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan asal usul, status sosial, ekonomi, kewilayahan, dan kondisi anak didik. Ya, *education for all*.

Menurut data, ada sekitar 70 persen anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belum memperoleh layanan pendidikan. Penyebab hal ini antara lain karena lokasi tempat tinggal sulit dijangkau, ketidakmampuan sekolah terdekat memberikan layanan pendidikan, dan ketidaktahuan orangtua dan masyarakat bahwa ABK juga harus disekolahkan dalam rangka wajib belajar. Oleh sebab itu, program peningkatan layanan bagi ABK haruslah terus ditingkatkan, termasuk layanan pendidikan.



Menurut data juga, pada 2011 itu, ada lima provinsi yang menjadi pelopor pendidikan inklusif, yaitu Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Di mana Jawa Timur? Kok tidak termasuk lima provinsi ini? Tetapi memang faktanya Jawa Timur menerima anugerah pendidikan inklusif. Kalau tidak percaya, lihat di daftar penghargaan Pakde Karwo itu.

Saya juga angkat topi untuk keberhasilan Pakde Karwo dalam melakukan program percepatan pemberantasan buta huruf (PBH). Penghargaan dalam bidang ini juga membuat saya terkesan. Luar biasa memang program PBH ini. Seingat saya, program ini sudah ada sejak saya kecil, atau bahkan sejak saya belum lahir. Saat masih mahasiswa, saya sempat terlibat dalam program PBH ketika melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama teman-teman seorganisasi pencinta alam di sebuah tempat di pelosok Jombang, Mojokerto, dan di beberapa kabupaten lain. Juga saat saya melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Lamongan. Ternyata sampai saya setua ini pun, program ini terus berlanjut. Rupanya dia merupakan salah satu program yang tak lekang oleh zaman.

Penghargaan yang diterima Pakde Karwo dalam percepatan PBH bukanlah tanpa bukti. Coba tengok data dari Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur (2014). Angka melek huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun ke atas selama 6 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 87,47 persen di tahun 2008 meningkat menjadi 90,49 persen di tahun 2013. Meski ditengarai populasi penduduk buta huruf di Kabupaten Sampang dan Sumenep masih di atas 20 persen, namun selama 2008-2013 ini, penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf berkurang sebesar 3,06 persen poin atau rata-rata setiap tahunnya berkurang sebesar 0,61 persen poin.

Upaya percepatan PBH ini memang harus terus dilakukan oleh Pakde Karwo dan semua jajarannya. Sebagaimana kita pahami, dari berbagai perspektif, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh indeks pembangunan manusia (IPM), yang meliputi tiga komponen, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Dari ketiga komponen ini, pendidikan mempunyai *multiplier effect* terhadap komponen lain, yaitu terhadap kesehatan dan pendapatan per kapita.

Oleh sebab itu, pendidikan harus digenjot sedemikian rupa agar bisa memberikan efek pada peningkatan kesehatan dan pendapatan per kapita. Pendidikan harus mampu memotong mata rantai kemiskinan, apalagi di kancah MEA.

### C. PROGRAM WAJAR

Bicara tentang kemiskinan, saya jadi ingat pada apa yang pernah dikemukakan mantan Mendikbud M. Nuh, pada beberapa kali kesempatan. Menurutnya, penyakit sosial ada tiga, yaitu kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan peradaban. Lingkaran penyakit sosial ini saling berkaitan, dan harus dipotong. Pisau pendidikanlah yang paling tajam untuk memotongnya, baik pendidikan yang ditempuh melalui jalur formal, informal, maupun nonformal.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tentu sangat memahami Program Wajib Belajar (Wajar). Program ini berawal pada 1984 dengan Wajar Sekolah Dasar. Kemudian berlanjut pada 1994 dengan Wajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994.



Inpres ini menginstruksikan kepada Menko Kesra, Mendikbud, Mendagri, Menag, dan Menkeu untuk melaksanakan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional yang dimulai pada tahun pelajaran 1994/95.

Indonesia bersama 191 negara anggota PBB telah menyepakati *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai pada 2015. Wajar Dikdas merupakan salah satu program yang diorientasikan untuk mencapai tujuan MDGs ini. Namun karena ada berbagai hambatan, pemerintah telah beberapa kali mengundurkan tahun pencapaian Wajar Dikdas yang awalnya 2004 menjadi 2009. Memang tidak mudah mencapai tujuan MDGs di bidang pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah 3T, namun juga di kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Wajar Dikdas sangatlah beragam. Selain rendahnya angka partisipasi tingkat SLTP dan rendahnya angka melanjutkan dari SD ke SLTP, permasalahan yang lain yaitu keterbatasan fasilitas sekolah, termasuk rusaknya fasilitas sekolah yang ada. Adanya krisis ekonomi sejak 1998 juga menambah dampak keterbatasan fasilitas. Studi SMERU pada 1999 dan 2003 (Gavin Jones, *et al.*) menemukan bahwa kondisi bangunan sekolah dan fasilitas sekolah SDN umumnya tidak memadai. Adanya ketergantungan pada pemerintah sebagai akibat dari dibangunnya SD-SD Inpres telah mengakibatkan hilangnya swadaya dan partisipasi masyarakat. Hambatan lain, adalah masalah klasik, yaitu terbatasnya sumber dana pemerintah.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah anak yang putus sekolah. Berbagai hasil studi dan pengalaman saya pribadi, anak lulusan sekolah dasar tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, masalah ekonomi keluarga. Anak dari keluarga miskin tidak memiliki dana untuk biaya pendidikan. Akibatnya, anak-anak membantu orangtua baik untuk bekerja maupun kegiatan lainnya. Berdasarkan pengalaman saya mengunjungi berbagai pelosok Indonesia, anak-anak tidak bersekolah karena mereka membantu bekerja di kebun, menyadap karet di hutan, menggembala ternak, mencari kayu bakar di hutan, mencari air, mencari rumput, atau mengasuh adiknya ketika orangtuanya tidak ada di rumah.

*Kedua*, rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak. Di berbagai wilayah ditemukan betapa tingkat kesadaran masyarakat masih begitu rendah tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal di masa depan. Rendahnya kesadaran ini antara lain tampak dari orangtua yang lebih mengutamakan anaknya bekerja untuk membantu ekonomi keluarga daripada bersekolah. Bahkan masih banyak orangtua yang melarang keras anaknya untuk pergi ke sekolah, dan mengancam anak-anak itu dengan ancaman-ancaman yang membuat mereka tidak berdaya.

*Ketiga*, jarak atau lokasi sekolah lanjutan pertama terletak jauh dari tempat tinggal murid. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi sarana dan prasarana (akses) transportasi. Buruknya ekonomi keluarga dan akses transportasi menyebabkan tidak terjangkau biaya transportasi. Buruknya infrastruktur transportasi juga menyebabkan sulitnya perjalanan untuk mencapai sekolah. Sudah jamak diketahui, bahwa banyak anak sekolah yang harus menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras dengan atau tanpa jembatan penyeberangan yang memadai, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk pergi ke sekolah. Di Sumba Timur, guru-guru harus membubuhkan obat luka sebelum siswa masuk kelas. Kaki anak-anak ini terluka karena tergores bebatuan dan duri-duri



tajam saat mereka harus menembus hutan belantara dan naik turun bukit saat berangkat pulang sekolah.

*Keempat*, adanya daya tarik cukup besar untuk bekerja dengan upah yang relatif tinggi. Di berbagai tempat, anak sekolah banyak yang membolos saat musim panen, atau saat hari pasar. Mereka memilih ikut bekerja di kebun atau menunggu dagangan di pasar, karena jelas pendapatannya secara ekonomi. Banyak orangtua yang menganggap sekolah tidak penting, karena tidak menjamin anak akan cepat mendapatkan pekerjaan. Peluang pekerjaan yang telah ada di depan mata lebih menjanjikan secara ekonomi daripada sekolah.

Berbagai persoalan di atas, tidak hanya terjadi di wilayah yang tergolong 3T, seperti di NTT, Papua, Maluku, dan sebagainya. Bahkan di Jawa Timur, persoalan-persoalan tersebut masih saja ada dan harus terus diperbaiki.

Menurut data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), di seluruh Indonesia, ada sebanyak 183 daerah tertinggal, 5 di antaranya ada di Jawa Timur (<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/05/19/mn1sr9-jumlah-daerah-tertinggal-bertambah>). Lima kabupaten di Jawa Timur ini, antara lain: Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Namun di luar kabupaten ini, banyak sekali desa tertinggal, termasuk di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan dan kabupaten lain, yang sebenarnya dari letak geografisnya relatif dekat dengan ibukota provinsi (Surabaya). Apalagi di kabupaten lain seperti Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, dan Jember, keberadaan desa tertinggal tersebut hampir tak terhitung jumlahnya.

Program Jawa Timur Mengajar, yang merupakan program kerja sama antara Unesa dan Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), merupakan program yang mengirimkan sarjana pendidikan ke daerah tertinggal di Jawa Timur. Meskipun menurut data hanya ada 5 kabupaten tertinggal di Jawa Timur, namun berdasarkan informasi yang langsung diperoleh dari beberapa Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten di Jawa Timur, banyak sekolah yang masih sangat kekurangan guru dan terbatas sekali sarana dan prasarannya. Di Kabupaten Ponorogo, misalnya, dari 20 kecamatan, setidaknya ada 5 kecamatan tergolong sebagai kecamatan terpencil. Kecamatan ini, antara lain: Kecamatan Pudak, Sooko, Sawoo, Ngrayun, dan Ngebel. Di setiap kecamatan ini, ada sejumlah sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, baik dilihat dari sarana dan prasarannya, maupun dari jumlah dan mutu gurunya.

Kabupaten yang lain, misalnya Madiun, dari 15 kecamatan, setidaknya ada 4 kecamatan yang di dalamnya terdapat beberapa sekolah yang kondisinya masih sangat memerlukan perhatian. Empat kecamatan ini, antara lain: Kecamatan Saradan, Gemarang, Dagangan, dan Kare. Sementara di Lamongan, dari 27 kecamatan, beberapa sekolah tertinggal tersebar di Kecamatan Sambeng, Solokuro, Maduran, Kembangbahu, Paciran, Sugio, Brondong, Modo, Kedungpring, Ngimbang, Sukorame, Bluluk, dan Laren.

Tentu saja, masih ada banyak sekolah tertinggal di kabupaten yang lain. Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota tersebut, bahkan di kabupaten yang berdekatan dengan ibukota provinsi pun (Sidoarjo dan Gresik), masih ditemukan beberapa sekolah yang berada di daerah pinggiran, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak hanya kondisi sarana dan prasarana serta guru dan siswanya, namun juga sulitnya medan yang mesti ditempuh untuk mencapai sekolah-sekolah tersebut. Perhatikan bunyi SMS berikut ini.



"Assalamualaikum,  
Bu Lutfi. Saya Muhtar Anas.

Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar dari Lamongan, tempat saya bertugas Jawa Timur Mengajar kemarin. Kabar yang saya terima, kondisi sekolahannya sekarang semakin parah. Ibu guru yg kemarin aktif mengajar, dan menjadi tumpuan utama dalam kegiatan belajar mengajar, sekarang sedang ada masalah keluarga. Dan itu berakibat dengan proses belajar anak-anak SDN JATIPANDAK, sering emosi, dan jarang masuk. Otomatis, sekarang yang sering ada di sekolah bersama anak-anak bapak guru yang sudah udzur dan sakit asma. Anak-anak semakin tidak terurus. Tidak bisakah Ibu merespon hal ini? Karena, mau tidak mau, sedikit banyak, baik UNESA, saya, dan YDSF telah memberikan satu kesan yang mendalam bagi warga Mlurus. Dan hal itu menjadikan warga menitipkan harapan yang lebih besar lagi dari UNESA, YDSF dan saya."

SMS itu saya terima beberapa hari yang lalu (dengan susunan bahasa yang sedikit ditata editor). SMS yang membuat hati saya diliputi kegundahan. Kegundahan yang sama sebagaimana kegundahan yang saya rasakan ketika saya mengunjungi sekolah tersebut, SDN Jatipandak, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sekitar pertengahan Oktober 2013 yang lalu. Tak pelak, kekaguman saya tak terbendung saat itu. Ya Tuhan, di manakah saya kini? Bukankah saya ada di Lamongan, sebuah kabupaten yang tak perlu menghabiskan setengah hari untuk mencapainya dari Surabaya, ibukota provinsi? Tentu kepala daerah setempat jauh lebih "terkagum-kagum" atas kondisi ini.

Hampir tak percaya saya menatap 4 bangunan yang ada di depan mata saya. Sebuah bangunan bercat oranye, terdiri dari empat ruang. Itulah bangunan yang paling indah di antara bangunan yang lain. Saya melongok ke bagian dalam. Dari terali kawat yang sudah berkarat, saya bisa melihat bangku-bangku, papan tulis dan dinding-dinding yang kusam, lantai tanah yang kotor, dan debu di mana-mana. Beberapa hiasan dinding, lukisan di atas kertas, sepertinya karya siswa, bahkan tak mampu memberikan sentuhan



Tempat bermain di salah satu sisi di SDN Jatipandak, Kecamatan Sambeng, Lamongan.





Jalan menuju SDN Kedung Banjar, Sambeng, Lamongan.

keindahan. Bagaimana mungkin anak bisa betah belajar di tempat 'senyaman' ini?

Satu bangunan dengan ukuran yang sama, melintang di ujung bangunan bercat oranye itu, membentuk huruf L, namun kondisinya bertolak belakang. Bangunan itu tak bercat, tak berpintu, banyak bagian temboknya yang retak, rangkanya melengkung, atapnya koyak, siap ambruk. Satu lagi, bangunan rumah sederhana, lumayan layak meski tembok depannya retak besar. Itulah mes guru. Jauh lebih layak dibandingkan dengan satu bangunan di depannya, yang terdiri dari tiga

petak. Tiga petak itu, juga mes guru. Tak terawat, tak layak huni. Temboknya kusam, pintu tripleksnya nyaris hancur.

Di situlah Muhtar Anas, salah satu peserta Jawa Timur Mengajar, kami tugaskan selama setahun. Di sebuah sekolah yang siswanya hanya 20 orang. Sekolah yang tak pernah melaksanakan upacara bendera, siswa-siswa yang tak hafal lagu Indonesia Raya, juga tidak hafal teks Pancasila. Dan saat ini, ketika Muhtar Anas tak lagi bertugas di sekolah itu, satu-satunya guru adalah guru yang sudah uzur dan sakit asma. Terbayangkah betapa tak terurusnya siswa-siswa di sekolah itu?

Saya hanya perlu sekitar 3,5 jam untuk menjangkau sekolah tersebut. Dari Surabaya, lewat Menganti, Balungpanggang, Mantup, Sambeng. Dengan mengandalkan Google Map di *tablet* saya. Tiga setengah jam, bukanlah waktu yang lama. Ini Lamongan, kabupaten yang masih berdekatan dengan Provinsi Jawa Timur. Bukan di NTT, Maluku, atau Papua. Namun sensasinya tak kalah dengan tempat-



Bersama Arif dan salah satu muridnya. Arif adalah peserta Jawa Timur Mengajar angkatan I, yang ditugaskan di SDN Kedung Banjar, Sambeng, Lamongan.



tempat yang disebut 3T itu. Kondisi sekolahnya, juga kondisi medannya.

Dan tentu saja, sekolah dengan kondisi semacam itu, juga ada di tempat lain. Bolehlah menengok SDN Kedung Banjar, di kecamatan dan kabupaten yang sama. Atau kalau ingin yang lebih 'keren', datanglah ke SDN Sendang 3 di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Bisa juga sekalian berkunjung ke SDN Baosan 7, menempuh perjalanan dengan bersepeda motor, yang pasti akan membuat pinggang Anda 'kemeng'. Dan di banyak sekolah lagi. Sekolah yang kondisi sarana prasarannya sangat



SDN Sendang 3, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo.

memprihatinkan, dengan siswa-siswanya yang bersepatu 'jitu (*drijine metu*)', dengan guru-guru honorer yang gajinya bahkan kalah jauh dengan gaji buruh pabrik. Miris.

#### D. SEBUAH HARAPAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pendidikan tidak hanya menjawab masalah-masalah yang sifatnya praktis dan teknis pada saat ini. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia untuk membangun peradaban unggul di masa depan. Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak percaya bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh SDM. Oleh sebab itu, pengembangan SDM menjadi hal yang sangat prioritas.

Kualitas SDM sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya, diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). Ada 3 komponen dalam IPM, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Ketiga-tiganya penting. Tetapi, yang mana dari ketiga hal itu sebagai *prime-mover*-nya? Sebagai penggerak utamanya? Jawabannya adalah: pendidikan.

Sebuah kajian yang bersumber dari *Human Development Report* (2011), *Global Competitiveness Report* (2010-2011) dan *World Bank* (2011) menunjukkan ada hubungan yang kuat antara lama belajar dan pendapatan per kapita dengan koefisien korelasi 0,93; lama belajar dengan daya saing 0,9; dan lama belajar dengan IPM secara keseluruhan 0,99. Hal ini berarti, ada hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut (Nuh, 2014)

Oleh sebab itu, program yang berpihak pada anak-anak dari keluarga miskin dan daerah-daerah tertinggal harus terus ditingkatkan. M. Nuh (2014) menyebutnya sebagai program keberpihakan (afirmasi), atau pendidikan yang ramah secara sosial. Tujuannya adalah agar anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan terbaik. Program semacam ini, selain berperan untuk memotong mata rantai kemiskinan, juga sekaligus meningkatkan harkat dan martabat. Prinsip dasar pendidikan adalah untuk semua, tidak



boleh ada diskriminasi, termasuk karena status sosial ekonomi. Akses ke dunia pendidikan harus terbuka luas bagi setiap lapisan masyarakat.

Sebelum mengakhiri tulisan sederhana ini, saya ingin mengukir harapan saya. Saya bermimpi, suatu saat, saya membaca daftar penghargaan yang diterima Pakde Karwo terkait bidang pendidikan lebih banyak. Khususnya pendidikan untuk daerah tertinggal di Jawa Timur. Siapa tahu, suatu saat, Pakde Karwo menerima anugerah sebagai provinsi pelopor pendidikan afirmasi terbaik di Indonesia. Siapa tahu, suatu saat, Pakde Karwo menerima penghargaan sebagai pencetus program 'Jawa Timur untuk Pendidikan di Desa Tertinggal'. Siapa tahu, suatu saat, Pakde Karwo menerima penghargaan dari MURI karena berhasil merenovasi ribuan sekolah miskin di Jawa Timur. Siapa tahu, suatu saat, Pakde Karwo mendapatkan penghargaan karena berhasil mendongkrak insentif guru honorer setidaknya sama dengan UMK. Pakde Karwo perlu mengajak bupati/walikota di Jawa Timur untuk lebih peduli dengan kondisi tersebut.

Saya juga bermimpi, setelah ini, saya akan sering melihat dan mendengar, bahwa Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur yang gagah dan ramah itu terus melakukan Program Sumbang Desa seperti yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Beliau bersama jajarannya akan sering terlihat berada di sekolah-sekolah miskin, di berbagai pelosok Jawa Timur, menyapa para siswa, guru, orang tua, dengan senyum dan sentuhan lembutnya. Beliau akan menjadi ikon pendidikan yang ramah sosial, pendidikan yang ramah untuk semua ....

Mungkinkah mimpi-mimpi saya itu bisa terwujud dalam sisa waktu masa jabatan Pakde Karwo?

Bisa jadi. Siapa tahu ....

Ya, *who knows?*

## Referensi

Impres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas Sembilan Tahun.

Jones, Gavin, *et al.* "Pengamatan Cepat SMERU tentang Permasalahan Pendidikan dan Program JPS, Beasiswa dan DBO di Empat Provinsi." Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, September 2003.

*Kompas*, 3 Maret 2000.

Nuh, Mohammad. 2014. *Menyemai Kreator Peradaban*. Jakarta: Zaman.

*Republika*. Jumlah Daerah Tertinggal Bertambah. <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/05/19/mn1sr9-jumlah-daerah-tertinggal-bertambah>. Diakses 7 Desember 2014.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

